Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia

Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi^a, Pujiyono^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: fryanditya@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, Email: pujiyono.fhundip@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 24-02-2021

Revised : 26-02-2021

Accepted : 27-02-2021

Published : 28-02-2021

Keywords:

Mediation of Penalties

Optimization

Restorative Justice

Abstract

The concept of penal mediation is an ideal peaceful settlement of criminal cases. However, in practice penal mediation is difficult to carry out, there are many factors inhibiting the implementation of penal mediation. This research will examine problems regarding how to optimize the implementation of penal mediation in Indonesia? This study uses a normative juridical method by basing its analysis on statutory regulations, using secondary data. Based on the results of the study, it is concluded that the settlement of criminal cases through the concept of penal mediation can be optimized as an alternative in resolving criminal cases outside the courts in Indonesia. The form of settlement of penal mediation through a deliberation mechanism between the parties, both the perpetrator and the victim, is mediated by the mediator, then a peace is asked to end the conflict. There are two concepts as an effort to optimize penal mediation in Indonesia, the settlement using customary law institutions in the community and the second concept is to make the first concept part of the criminal justice system (SPP) process in Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 24-02-2021

Direvisi : 26-02-2021

Disetujui : 27-02-2021

Diterbitkan : 28-02-2021

Kata Kunci:

Mediasi Penal

Optimalisasi

Restorative Justice

Abstrak

Konsep mediasi penal merupakan penyelesaian damai kasus tindak pidana yang sangat ideal. Akan tetapi dalam praktiknya mediasi penal sulit dilaksanakan, banyak faktor-faktor penghambat terlaksananya mediasi penal. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana optimalisasi pelaksanaan mediasi penal di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui konsep mediasi penal dapat dioptimalisasikan menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan di Indonesia. Bentuk penyelesaian mediasi penal melalui mekanisme musyawarah antara para pihak baik itu pelaku dan korban yang ditengahi oleh mediator selanjutnya dimintakan perdamaian pada untuk mengakhiri konflik. Ada dua konsep sebagai upaya untuk optimalisasi mediasi penal di Indonesia penyelesaian dengan menggunakan lembaga hukum adat di tengah masyarakat dan konsep yang kedua yaitu menjadikan konsep pertama sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pemicu terjadinya sengketa adalah “kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.¹ Sengketa dalam bisa juga terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar individu, antar golongan, atau antar pemerintah dan masyarakatnya.² Kepentingan masing-masing individu atau golongan memang berbeda, namun ketika masing-masing individu atau golongan tersebut memaksakan kepentingannya, maka akan munculah sengketa tersebut.

Misalnya di masa penyebaran Covid-19 ini, seringkali terjadi konflik antara pasien dan pihak rumah sakit, hal ini dikarenakan pihak keluarga merasa keluarganya yang menjadi pasien tidak mengalami Covid-19, namun pihak rumah sakit menyatakan bahwa pasien tersebut positif Covid-19. Kepentingan rumah sakit adalah mendapatkan dana karena merawat pasien Covid-19, namun di sisi lain pihak keluarga pasien merasa bahwa apabila dinyatakan Covid-19, maka akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitar dan juga pihak keluarga merasa sangat khawatir. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik hukum, baik di bidang hukum pidana maupun di bidang hukum perdata. Pada konteks penulisan ini konflik yang akan di bahas adalah konflik pidana.

Setelah terjadinya konflik pidana maka diperlukan suatu penyelesaian konflik tersebut. Di Indonesia dikenal ada 2 (dua) jenis penyelesaian perkara yaitu secara litigasi dan secara non litigasi/konsensual/non-ajudikasi. “Memahami bahwa proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu. Sistem pengadilan konvensional secara alamiah berlawanan, sering kali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Sementara itu kritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya yang dianggap terlalu padat, lamban dan buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum serta dianggap terlalu formalistik dan terlampaui teknis. Itu sebabnya masalah perlunya peninjauan kembali

¹ Kusuma, Endang Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Citra, 2017): 21

² Vernando. “Analisis Akibat Hukum Dari Penguasaan Secara Melawan Hak Atas Tanah Waris Bersertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 299/PDT.G/2014/PN.JKT.PST)”. *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 2 (2019): 247.

perbaikan sistem peradilan ke arah yang efektif dan efisien. Bahkan muncul kritik yang mengatakan bahwa proses pengadilan beserta hasilnya dianggap tidak efisien dan tidak adil”.³

Pada praktik peradilan pidana di Indonesia, masih memihak pada kepentingan pelaku bukan kepentingan korban. Hal ini menjadikan pihak keluarga korban merasa hukum pidana tidak mewujudkan keadilan karena pidana yang jatuhkan kepada pelaku tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Walaupun dalam perkembangannya, muncul perhatian terhadap korban, namun belum terbangun suatu kebijakan sistem pidana yang integral.⁴ Hukum pidana di Indonesia sebenarnya telah memberikan instrument pemenuhan hak korban oleh pelaku, yaitu melalui instrument pidana yang disebut restitusi. Restitusi berlaku untuk semua tindak pidana yang menimbulkan kerugian korban secara langsung dan bentuknya tidak harus uang, dan keberadaannya tidak hanya sekedar uang, tapi kewajiban moral pelaku untuk memperbaiki kondisi korban.⁵ Disinilah pentingnya peran seorang Jaksa yang harus merepresentasikan hak korban, seorang Jaksa harus mampu menyusun tuntutan yang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban, agar terjadi keseimbangan pemenuhan hak antara pelaku dan korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁶

“Kelemahan dan ketidakpuasan terhadap operasionalisasi sistem peradilan pidana mendorong untuk dicari penyelesaian alternatif dari sistem peradilan pidana dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, yaitu dengan cara mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice*”⁷ yaitu “perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang

³ Rahmah, Andi Syamsiar Arief. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurisprudentie* 5, No. 2, (2012): 254.

⁴ Eko SoponyoNo. “Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, No. 1 (2012): 29.

⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”. *Yuridika* 33, No. 2, (2018): 260.

⁶ Rena Yulia. (2016). “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Mimbar Hukum*. 28, No. 1 (2016): 44.

⁷ Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000): 45.

terjadi antara pelaku dengan korban”⁸, Selain itu bertujuan untuk mengubah perspektif formalitas hukum pidana beralih pada perspektif materil demi mencapai hukum pidana yang berkeadilan, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternatif to imprisonment/ alternative to custody*), dan “upaya penyelesaian dalam perkara tindak pidana yang lebih bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan harkat dan martabat manusia serta penyelesaiannya memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*) serta untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara (*the problem of court case overload*)” dan untuk penyederhanaan proses peradilan pidana.⁹

Asas hukum pidana positif Indonesia, “perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi penegak hukum, mekanisme perdamaian secara kekeluargaan, mekanisme musyawarah, lembaga adat dan sebagainya”¹⁰ Adanya implikasi serius dalam praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di Indonesia, hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum yang kuat dalam praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Lazimnya praktik ini hanya dilakukan antara pihak keluarga, bisa juga ditambah dengan tokoh masyarakat, maupun penasihat hukumnya. Akan tetapi praktik tersebut sangat lemah kekuatannya mengikatnya, sehingga sangat mudah untuk disangkal, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum secara litigasi walaupun sudah ada kesepakatan damai antara para pihak yang berkonflik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa pokok persoalan yang menjadi permasalahan, Pertama: Bagaimana upaya optimalisasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan? Kedua: Apa saja hambatan dalam implementasi mediasi penal?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan penelitian yaitu mengenai mediasi penal berdasarkan aturan positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mencari jawaban atas

⁸ Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf, “Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020): 24. <<https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>>

⁹ Nawawi, Barda Arief. *Op Cit.* Hlm. 45.

¹⁰ Soekanto, SoerjoNo, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007): 34.

research problem berdasarkan bahan bacaan atau data sekunder.¹¹ Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan pembahasan penelitian. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yaitu deskriptif analitis, dengan menggambarkan objek penelitian.

UPAYA OPTIMALISASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN

Pembahasan dan Analisis pada bagian ini akan dilakukan dengan mendasarkan pada teori-teori sebagai berikut¹²; “Teori hukum dari Muzakir bahwa beberapa katagorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal, *Theorie receptive* dari Snouck Hurgronje, *Teori realism*, *Sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound*, Teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat”.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep mediasi penal atau *penal mediation* yang sering disebut dengan istilah lain seperti *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*, bahasa Belanda disebut *strafbemiddeling*. Sedangkan istilah mediasi penal tersebut apabila dalam bahasa Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tatausgleich* (ATA), serta Bahasa Prancis disebut *de mediation pénale*. Konsep mediasi penal akan mempertemukan pelaku dengan korban, sehingga Mediasi penal disebut juga sebagai “*Victim-Offender Mediation* (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA)”¹³

Mediasi penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar proses litigasi di Pengadilan. Sebenarnya konsep mediasi penal mirip dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*), atau *Apro-priate Dispute Resolution*. Perbedaanya terletak pada bidang konflik hukum apa yang terjadi atau yang ingin diselesaikan. Bila Mediasi penal

¹¹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020): 25.

¹² Mudzakki. “Alternative Dipute Resolution (ADR), “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007): 3.

¹³ Nawawi, Barda Arief (2019) “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_tn2 (diakses pada tanggal 17 November 2019).

dikenal dalam bidang hukum pidana sedangkan ADR lebih dikenal dalam bidang hukum perdata. “Berdasarkan pada hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini, prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun dalam hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan”¹⁴

Mediasi Penal memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya sebagaimana ditentukan dalam *recomendation no (99), 19 The Comitée of ministers of The council Of Europe* tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa prinsip umum sebagai berikut; Penyelesaian masalah dengan mediasi hanya dapat berlangsung apabila para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi. Para pihak seharusnya juga dapat menarik persetujuan untuk melakukan mediasi selama proses mediasi berlangsung. Segala macam hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak akan digunakan sesudah itu, kecuali dengan persetujuan para pihak. Mediasi penal harus dapat di sediakan dalam setiap tahapan proses dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal haruslah diberi otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Mediasi Penal sama dengan pemikiran pembaharuan hukum pidana (*Law Reform*) di Indonesia dan permasalahan pragmatismenya. Law Reform di bidang hukum pidana lebih mengutamakan kepentingan korban dibanding dengan kepentingan pelaku, dengan mengembangkan ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, pemikiran semacam ini merupakan jalan keluar terhadap permasalahan klasik yang selama ini dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya dalam hal hukum pidana yang terlalu formalistik dan pragmatis.¹⁶ Gagasan ide mengenai mediasi penal bertujuan agar segera mengatasi efek negatif yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, mediasi penal hadir sebagai suatu alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*). Masalah pragmatis yang terjadi saat ini antara lain “untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*) dan untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya”

¹⁴ Nawawi, Barda Arief, *Op Cit*: 35.

¹⁵ Laely Wulandari. “Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal”. *Law Reform* 4, No. 1, (2008): 16.

¹⁶ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, Eko SoponyoNo. “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Law Reform* 12, No. 2, (2016): 268.

Mediasi penapenyelesaiannya tidak secara formil difasilitasi oleh negara melainkan melalui mekanisme lembaga adat (Peradilan Gampong, Budaya Bakar Batu, Lembaga Begundem dan awig-awig), karena selama ini mediasi penal tidak diatur pada tataran Undang-Undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.¹⁷ Mediasi penal merupakan refleksi nilai keseimbangan dari Pancasila untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, yang dilandasi nilai religius, kekeluargaan dan keselarasan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang kita miliki, sungguh ironi bahwa setiap tindak pidana yang terjadi harus diselesaikan dengan pidana, karena pada hakikatnya pidana bukanlah satu-satunya sarana untuk menyelesaikan masalah.

Secara historis, kultur masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat.¹⁸ Kearifan lokal yang dikenal secara gamblang yaitu hukum adat (*local wisdom*) adalah kebiasaan masyarakat setempat yang sudah ter pola dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*inner order/living law*) Indonesia. Mediasi penal apabila dipandang dari dimensi *local wisdom* maka pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti misalnya kepala adat, yang juga mempunyai lembaga hukum adatnya yang diatur dalam bentuk *awig-awig*, atau dalam peradilan adat misalnya peradilan adat Dayak. Dengan demikian demi menjamin kepastian hukumnya dan kekuatan mengikatnya, maka pada tataran praktis harus ada aturan pelaksana mengenai tatacara pembentukan peradilan adat di Indonesia sebagai salah satu cara untuk bisa menerapkan mediasi penal, karena apabila tidak ada peradilan adat maka mediasi penal yang telah di konsepkan tersebut tidak bisa dilakukan.¹⁹ Alasan kultural yang demikian untuk eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidak keefisienan proses dalam menangani sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui bahwa mediasi penal merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan jatidiri masyarakat Indonesia.

¹⁷ Lilik Mulyadi. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik". *Yustisia* 2, No. 1 (2013): 1.

¹⁸ I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni. "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Acta Comitatus : Jurnal Hukum KeNotariatan* 4, No. 3, (2019): 398.

¹⁹ Yusriando. "Implementasi Meiasi Penal Sebagai Perwujudan Nila-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2015): 32.

Sehingga perlu untuk dibentuk suatu landasan hukum mengenai pelaksanaan mediasi penal di Indonesia. Landasan hukum mengenai mediasi Penal di Indonesia sebenarnya sudah ada namun masih bersifat parsial dan masih terpisah-pisah di dalam peraturan beberapa perundang-undangan, seperti dalam Peraturan dan Surat Kapolri serta Peraturan Menteri. Salah satu contoh penerapan mediasi penal di Indonesia yaitu Diskresi polisi, terhadap tindak pidana yang ditanganinya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa “Apabila Undang-Undang Mediasi Penal tidak dapat diwujudkan maka mengakibatkan penumpukan perkara terjadi di pengadilan sehingga secara ekonomis pengeluaran keuangan negara dan perekonomian negara meningkat “Undang-Undang mengenai mediasi penal ini hendaknya diatur tentang mediasi penal yang dilakukan ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Selain itu, juga diatur tentang eksistensi lembaga baru, petugas mediator, proses dan substansi mediasi penal”²⁰

Beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan menggunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *Pertama*, perlu memberikan rumusan yang tegas berkenaan dengan ketentuan mediasi penal. Sehingga untuk ke depan, terhadap perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana yang efek atau kerugian ekonomi maupun kerugian sosialnya relatif kecil atau tidak terlalu besar sudah memiliki payung hukum sebagaimana proses diversifikasi yang diterapkan pada sistem peradilan anak. *Kedua*, dalam menentukan kebijakan untuk memformulasi mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu ditentukan kriteria tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi penal.

Penerapan mediasi penal sejauh ini hanya untuk penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan belum pernah diterapkan di pengadilan pada umumnya, kecuali terhadap penyelesaian perkara yang pelakunya anak dengan menerapkan proses diversifikasi karena dimungkinkan oleh sistem Undang-Undang peradilan anak. Untuk perkara ringan yang nilai kerugian tidak terlalu besar, pengadilan biasanya tetap melanjutkan proses peradilan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam putusan terhadap perkara tersebut. Biasanya pertimbangan *restorative justice* yang dilakukan hakim dalam putusannya yaitu memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa. Dengan demikian, hendaknya Mahkamah

²⁰ Angrayni, Lysa. “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian PERkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 1, (2016): 91.

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) agar para hakim dalam segala tingkatannya menerapkan mediasi penal dalam perkara tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa mediasi penal pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan kultur/budaya Indonesia yang menjunjung tinggi pendekatan konsesus. Optimalisasi media penal dapat dilakukan dengan di buatnya undang-undang tentang mediasi penal; dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) agar para hakim dalam segala tingkatannya menerapkan mediasi penal; dan pengaturan peradilan sebagai salah satu cara atau solusi untuk melakukan mediasi penal sehingga membudayakan kearifan local di samping sistem peradilan pidana.

HAMBATAN DALAM MENGOPTIMALISASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PENGADILAN

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang rumit. Menurut Barda Nawawi Arief, “dilihat dari sudut politik kriminal, Kelemahan dan ketidakpuasan terhadap operasionalisasi sistem peradilan pidana mendorong untuk dicari penyelesaian alternatif dari sistem peradilan pidana dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, yaitu dengan cara mediasi penal sebagai perwujudan *restorative justice*”²¹

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan mediasi penal, merupakan perwujudan dari prinsip *restorative justice*, yang ditujukan agar penegakan hukum meskipun menyimpang dari hukum formil namun tetap mengedepankan nilai keadilan di tengah masyarakat. Restorative Justice merupakan ide untuk mengembalikan kepada keadaan semula, pelaksanaan prinsip ini yaitu dengan mediasi penal yang tujuannya untuk memanusiaikan korban, pelaku, dan masyarakat.²² Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum, polanyapun dilakukan dengan berpedoman pada nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan. Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh

²¹ Nahwawi, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000): 20.

²² Kuat Puji PrayitNo. “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”. *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 407.

golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua dari tiga nilai dasar hukum selain Kemanfaatan hukum.²³ Ketiga nilai dasar inilah yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan dan penegakkan hukum di Indonesia.

“Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator”²⁴

Hambatan dari mediasi penal adalah:

a. Masalah operasional meliputi:

- 1) “Rekomendasi kasus untuk memakai mediasi. Hal ini merupakan masalah klasik dan selalu menghambat secara umum. Pemahaman serta kerja sama antar penegak hukum yang masih kurang dalam merekomendasikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus”.
- 2) “Terbatasnya waktu yang disebabkan karena mediasi penal berada dalam sistem peradilan pidana, maka memiliki keterbatasan waktu, apalagi bila kasusnya kompleks ataupun sensitif”.
- 3) “Kurangya persiapan dan tindak lanjut. Ini dikarenakan banyaknya penyidik/mediator yang kurang persiapan dalam menghadapi suatu kasus. Apalagi bila dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang berbeda tiap kasus. Apalagi mediator juga menganggap bahwa tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Sementara setelah itu masih ada tugas pengawasan kesepakatan mediasi tersebut”.
- 4) “Mediasi tidak langsung, yang bila digunakan maka akan memakan waktu dan kurang produktif bila dibandingkan mediasi langsung dimana korban dan pelaku saling bertemu”.
- 5) Kurangnya sumber daya, yang apabila terbatas kuantitas dan kualitasnya dari aparat penegak hukumnya itu sendiri serta ditambah terbatasnya fasilitas ruangan. Sementara ruangan yang memenuhi syarat sesuai asas kerahasiaan yang harus dijaga.

²³ Fence M Wantu. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum* 25, No. 2 (2013): 207.

²⁴ S. Susanto. *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). 65.

- b. “kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal Dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah”.
- c. “Akuntabilitas pelaku Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari pidana penjara. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, pelaku tidak mau melaksanakannya”.
- d. “Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal Dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah”.
- e. “Akuntabilitas pelaku Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindar dari pidana penjara. Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, pelaku tidak mau melaksanakannya”.

Mediasi Penal merupakan salah satu jalan untuk pencarian keadilan hukum di Indonesia saat ini, dipandang adil apabila pelaku disidangkan di pengadilan dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. “Sedangkan kerugian yang dialami oleh korban secara tidak langsung dianggap terpenuhi dengan hukum yang dijalani pelaku. Apabila memperhatikan prosedur dan substansi dari pidanaan hanya terfokus pada faktor penjeratan dan pencegahan semata, di lain sisi korban butuh pemulihan dari perbuatan si pelaku.”²⁵

Apabila diteliti lebih dalam KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, sementara untuk korban (*Victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidaklah sebanyak hak-hak tersangka dan terdakwa. “Hal tersebut dapat dimungkinkan hak korban dan Masyarakat telah diwakilkan oleh negara. Berbeda halnya dngan zaman dahulu, korban ataupun keluarganya dapat meminta langsung ganti rugi atau pembalasan kepada pelaku.”²⁶ Sehingga perlu dipikirkan dan dirumuskan suatu pembaharuan hukum pidana agar mampu melakukan optimalisasi penegakkan hukum pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Optimalisasi media penal dapat dilakukan dengan di buatnya undang-undang tentang mediasi penal; dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) agar para hakim

²⁵ G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Uajy, 2013): 45.

²⁶ Waluyo, Bambang, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 12.

dalam segala tingkatannya menerapkan mediasi penal; dan pengaturan peradilan sebagai salah satu cara atau solusi untuk melakukan mediasi penal sehingga membudayakan kearifan local di samping sistem peradilan pidana. Di dalam proses pencarian alternative penyelesaian masalah yang mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum tidak lah mudah di mana banyaknya kendala di masyarakat yang masih berpikiran bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus di jatuhi hukuman pidana karena di lihat dari faktor substansi pemedanaan hanya terfokus pada faktor pemenjaraan semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, Wibowo, Ari. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”. *Yuridika*. 33, No. 2, (2018): 260.
- Angrayni, Lysa. “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian PERkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restroative Justice”, *Jurnal Hukum Respublica* 16, No. 1, (2016): 91.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020): 25.
- G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Uajy. 2013.
- Gusti, I Ayu Made Yustina Mahayuni. “Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum KeNotariatan*. 4, No. 3, (2019): 398.
- Hasyim, Rudini Rado, Barda Nawawi Arief, Eko SoponyoNo. “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. *Law Reform* 12, No. 2, (2016): 268.
- Kusuma, Endang Astuti. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra. 2007.
- Mudzakki. “Alternative Dipute Resolution (ADR), “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, (makalah workshop, Jakarta, 18 Januari 2007).

- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik". *Yustisia*. 2, No. 1 (2013): 1.
- Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2000.
- Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2000.
- Nawawi, Barda Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister. 2008.
- Nawawi, Barda Arief. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Semarang: Undip Press. 2019.*
https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/#_tn2 (diakses pada tanggal 17 November 2019).
- Puji, Kuart Prayitno. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)". *Jurnal Dinamika Hukum*. 12, No. 3 (2012): 407.
- Rahmah, Andi Syamsiar Arief. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurisprudentie* 5, No. 2, (2012): 254.
- S. Susanto. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2011.
- Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf, "Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2020): 24. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2007.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 41, No. 1 (2012): 29.

- Vernando. “Analisis Akibat Hukum Dari Penguasaan Secara Melawan Hak Atas Tanah Waris Bersertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 299/PDT.G/2014/PN.JKT.PST)”. *JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau* 8, No. 2 (2019): 247.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Wantu, Fence M. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum*. 25. No. 2, (2013): 207.
- Wulandari, Laely. “Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal”. *Law Reform*. 4, No. 1, (2008): 16.
- Yulia, Rena. (2016). “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Mimbar Hukum*. 28, No. 1 (2016).
- Yusriando. “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (2015): 32.